

ANALISIS SWOT SEBAGAI IMPLEMENTASI SAKIP DALAM DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Fitri Pebriani Wahyu^{1)*}, Anisa Oktaviani Ranteala¹⁾,
Annisa Syailina Hazh¹⁾ & Arya Maulana Alfarizy¹⁾
UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁾
Email: fitriFISIP11@uinsgd.ac.id*

Riwayat Artikel

Diterima: 17 Juli 2023

Disetujui: 20 Agustus 2023

Diterbitkan: 5 September 2023

Abstract

SWOT analysis is a method used to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats faced by an organization, and SAKIP is a system used to measure and monitor the performance of a government organization in achieving its goals and objectives. This study aims to analyze the application of SWOT analysis to the implementation of the Government Performance Accountability System (SAKIP) in the General Directorate of Taxation (DJP). This research uses a qualitative approach by conducting a case study on DJP. Data obtained through in-depth interviews with officials involved in the implementation of SAKIP, direct observations, and related document analysis. Research results show that the application of SWOT analysis in DJP can provide a better understanding of the internal and external conditions that affect the performance of an organization. The results of DJP's SWOT analysis reveal several strengths, such as advanced information systems, a trained workforce, and good relationships with stakeholders. Based on the results of the SWOT analysis, several strategies are recommended to improve DJP's performance. The strategy includes increased use of information technology, increased awareness and training related to SAKIP, simplification of administrative procedures, improved coordination between work units, enhanced cooperation with stakeholders, and monitoring of regulatory changes.

Keywords: SWOT analysis, implementation, SAKIP, Directorate General of Taxation(DJP)

Abstrak

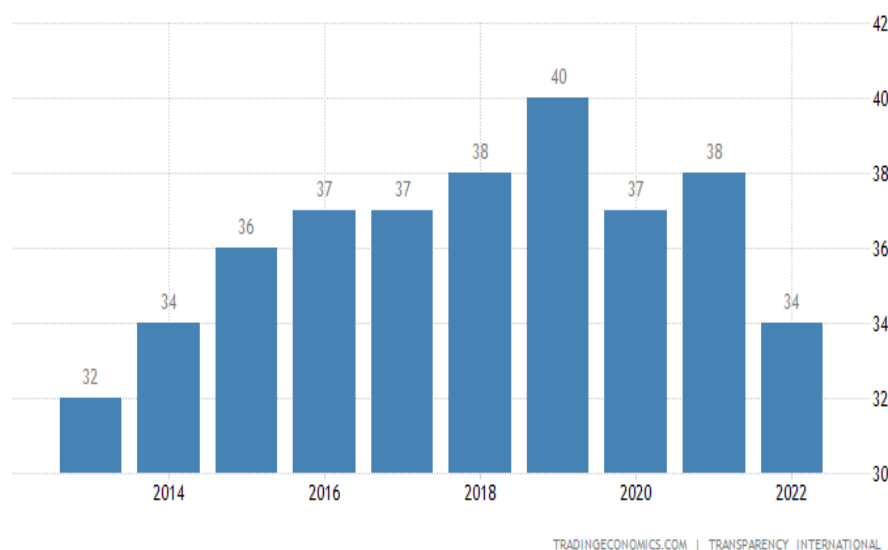
Analisis SWOT adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang dihadapi oleh suatu organisasi dan SAKIP adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Analisis SWOT sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kasus pada DJP. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas yang terlibat dalam implementasi SAKIP, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Analisis SWOT dalam DJP dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Hasil analisis SWOT DJP mengungkapkan beberapa kekuatan, seperti sistem informasi yang canggih, tenaga kerja yang terlatih, dan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil analisis SWOT, direkomendasikan beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja DJP. Strategi tersebut meliputi peningkatan penggunaan teknologi informasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan

terkait SAKIP, penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan koordinasi antar unit kerja, peningkatan kerjasama dengan pemangku kepentingan, dan pemantauan terhadap perubahan regulasi.

Kata Kunci: Analisis SWOT, Implementasi, SAKIP, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga pengelola perpajakan untuk memperkuat kinerjanya guna mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, DJP perlu menerapkan sistem yang efektif dalam pengelolaan kinerjanya. Salah satu pendekatan yang relevan adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik (Khasanah & Yushita, 2016). Peningkatan Transparansi, akuntabilitas dan efektifitas sangatlah penting dilakukan karena mengingat indeks korupsi dan patalogi sangatlah masih tinggi dari tahun ketahun, berikut data indek korupsi di Indonesia.



Gambar 1. Indek Korupsi Indonesia dari Tahun 2014-2020

Sumber: *Tranding Economi* (2022)

Meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang membahas implementasi SAKIP dalam konteks organisasi publik, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi SAKIP dalam Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki *novelty* dan tujuan yang penting untuk mengisi kekosongan penelitian tersebut dan memberikan wawasan baru mengenai penerapan SAKIP dalam konteks DJP. Salah satu aspek unik dari penelitian ini adalah penggunaan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sebagai alat untuk menganalisis implementasi SAKIP dalam DJP (Monoarfa, et al, 2017). Analisis SWOT akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal DJP, serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi implementasi SAKIP. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang posisi dan kondisi DJP saat ini, serta merumuskan strategi yang efektif untuk memperkuat implementasi SAKIP.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi SAKIP dalam Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan internal DJP dalam implementasi SAKIP, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal yang mempengaruhi implementasi SAKIP dalam DJP, merumuskan strategi yang tepat untuk memperkuat implementasi SAKIP,

serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu DJP dalam mengoptimalkan sistem SAKIP untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Melalui penelitian ini, diharapkan DJP dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi implementasi SAKIP dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem ini. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi kepada peneliti, praktisi, dan pihak terkait lainnya dalam memahami dan meningkatkan pengelolaan kinerja organisasi publik melalui implementasi SAKIP dalam konteks Direktorat Jenderal Pajak.

B. KAJIAN PUSTAKA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah suatu mekanisme atau sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengukur, mengelola, dan melaporkan kinerja mereka secara transparan dan akuntabel. SAKIP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah (Murdi, et al, 2020.). Adapun tujuan dari SAKIP ini diantaranya 1) Untuk meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan; 2) Mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah secara objektif; 3) Meningkatkan transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja; 4) Memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada pemangku kepentingan mengenai kinerja instansi pemerintah. 5) Mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

SAKIP terdiri dari beberapa komponen yang selalu ada dan tidak bisa dihapuskan diantaranya 1) Perencanaan Kinerja; Merupakan langkah awal dalam SAKIP, meliputi penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi pemerintah. Dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). 2) Pengukuran Kinerja; Melibatkan pengembangan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Dilakukan melalui pengumpulan data kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Data kinerja ini dapat berupa jumlah pelayanan yang diberikan, capaian target, atau hasil survei kepuasan masyarakat. 3) Pelaporan Kinerja; Merupakan tahap penyampaian informasi kinerja kepada pemangku kepentingan. Laporan kinerja harus disusun secara terstruktur, jelas, dan komprehensif. Meliputi penjelasan mengenai tujuan dan sasaran, capaian kinerja, analisis gap, tindak lanjut, dan rekomendasi perbaikan. 4) Evaluasi Kinerja; Bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan tantangan dalam pencapaian kinerja instansi pemerintah. Evaluasi dapat dilakukan secara internal oleh tim evaluasi atau melalui pihak eksternal, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau lembaga audit lainnya (Badruzaman & Chairunnisa, 2012).

Adapun manfaat dari SAKIP yaitu 1) Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan; 2) Mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik dengan mengidentifikasi kegiatan yang tidak efisien atau tidak memberikan hasil yang diharapkan; 3) Memungkinkan pemantauan dan pengendalian kinerja yang lebih baik, sehingga instansi pemerintah dapat melakukan perbaikan yang diperlukan; 4) Meningkatkan transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan serta penggunaan anggaran publik; 5) Memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat tentang capaian kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik; 6) Memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan dan pengalokasian sumber daya.

Berikut Proses Implementasi SAKIP: 1) Penetapan kebijakan dan regulasi terkait: Pemerintah menetapkan kebijakan dan regulasi yang mengatur implementasi SAKIP di instansi pemerintah. Hal ini mencakup panduan teknis, pedoman pelaporan, dan prosedur evaluasi. 2) Pembentukan Tim SAKIP: Instansi pemerintah membentuk tim SAKIP yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan SAKIP, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi kinerja. 3) Penyusunan dokumen perencanaan: Instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan, seperti Renstra, RKP, dan RKT, dengan menyertakan indikator kinerja yang terukur dan realistis. 4) Pengumpulan dan pengolahan data kinerja: Instansi pemerintah mengumpulkan data kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Data ini diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang pencapaian kinerja. 5) Penyusunan laporan kinerja: Instansi pemerintah menyusun laporan kinerja yang terstruktur dan komprehensif, mencakup informasi tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja, analisis gap, tindak lanjut, dan rekomendasi perbaikan. 6) Evaluasi kinerja: Dilakukan evaluasi kinerja oleh tim evaluasi internal atau eksternal untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian kinerja serta memberikan rekomendasi perbaikan. 7) Pemantauan dan tindak lanjut: Instansi pemerintah melakukan pemantauan terhadap implementasi rekomendasi perbaikan dan melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang (Irda, et al, 2015.). Melalui implementasi SAKIP, diharapkan instansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menjalankan kebijakan perpajakan. DJP berada di bawah Kementerian Keuangan dan memiliki peran penting dalam mengumpulkan pendapatan negara melalui sistem perpajakan. Tugas utama DJP meliputi pengawasan, pelayanan, dan penegakan hukum perpajakan di Indonesia. Salah satu tugas DJP adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (Lidya, 2021). DJP melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk pembayaran pajak tepat waktu dan penyampaian laporan keuangan yang akurat. Selain itu, DJP juga berperan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, seperti memberikan informasi, konsultasi, dan bantuan teknis terkait perpajakan.

Dalam menjalankan tugasnya, DJP juga melakukan penegakan hukum perpajakan. Jika terdapat pelanggaran perpajakan, DJP memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penagihan, dan penindakan terhadap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Upaya penegakan hukum ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menjaga keadilan dalam sistem perpajakan (Suparman, et al, 2019). Fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakni antara lain merumuskan kebijakan yang menyangkut mengenai perpajakan, melaksanakan kebijakan mengenai perpajakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perpajakan, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi mengenai perpajakan, dan melaksanakan administrasi (Tamar, et al, 2022).

Selain itu, DJP juga bertanggung jawab dalam mengembangkan kebijakan perpajakan yang berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. DJP terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem perpajakan, termasuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam menjalankan perannya, DJP bekerja sama dengan instansi pemerintah lain, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Kerjasama ini penting untuk memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan di Indonesia. Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran sentral dalam mengatur dan menjalankan kebijakan perpajakan di Indonesia. Dengan melaksanakan tugas pengawasan, pelayanan, dan penegakan

hukum perpajakan, DJP berupaya mendorong kepatuhan wajib pajak, mengumpulkan pendapatan negara, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah metode yang digunakan dalam perencanaan strategis untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada dalam suatu organisasi, proyek, atau situasi bisnis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja atau kesuksesan suatu entitas (Jannah, et al, 2017).

Dalam analisis SWOT, kekuatan dan kelemahan mengacu pada faktor internal yang ada di dalam organisasi atau proyek. Kekuatan dapat mencakup keunggulan kompetitif, sumber daya yang kuat, kualitas produk atau layanan yang unggul, atau keahlian khusus yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Di sisi lain, kelemahan adalah aspek-aspek yang membatasi kinerja atau daya saing organisasi, seperti kekurangan sumber daya, keterbatasan teknologi, atau kurangnya keahlian kunci (Nggini, 2019). Sementara itu, peluang dan ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi atau proyek. Peluang merujuk pada situasi atau tren di luar organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja atau mencapai keunggulan kompetitif. Contoh peluang meliputi perubahan kebijakan pemerintah, pergeseran preferensi konsumen, atau pasar baru yang muncul. Ancaman, di sisi lain, adalah faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat kesuksesan organisasi, seperti persaingan yang intens, perubahan regulasi, atau perubahan tren pasar.

Dengan melakukan analisis SWOT secara menyeluruh, organisasi atau proyek dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang posisi mereka di pasar dan menentukan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman. Analisis SWOT juga membantu dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut, serta membantu dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang organisasi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-kualitatif. Menggunakan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber literatur yang relevan, metode ini digunakan untuk mendefinisikan dan menjelaskan bagaimana Analisis SWOT sebagai Implementasi SAKIP di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Teknik deskriptif-kualitatif melibatkan langkah-langkah berikut: 1) Pengumpulan data: Data dikumpulkan melalui konsultasi sumber-sumber sastra, termasuk buku, jurnal, artikel, dan dokumen pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Literasi yang disebutkan berasal dari berbagai sumber yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab. 2) Data Seleksi: Data yang relevan dan terkait dengan topik penelitian dipilih. Informasi yang dikumpulkan adalah konsisten dengan tujuan penelitian dan premis sentral. Membaca, memahami, dan menganalisis data yang dikumpulkan adalah semua langkah yang diperlukan dalam proses analisis data. Dengan menggunakan prosedur analisis konten, yang melibatkan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data berdasarkan kategori tertentu, data yang dikumpulkan kemudian dinilai secara kualitatif. Presentasi data (*data presentation*) adalah presentasi data secara sistematis dan terorganisir. Untuk membantu pembaca memahami temuan analisis, data yang diperiksa kemudian diatur dan disajikan sebagai tabel, grafik, atau diagram. 5) Kesimpulan dan Saran: Berdasarkan temuan dari analisis data, kesimpulannya dan rekomendasi dibuat. Kemudian, narasi yang ringkas dan teratur digunakan untuk menyajikan hasil dan rekomendasi ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian analisis SWOT dalam implementasi SAKIP dalam Direktorat Jenderal Pajak mengungkap beberapa temuan yang relevan. Kekuatan utama yang diidentifikasi adalah penggunaan teknologi informasi yang canggih dalam pengelolaan data pajak. Dengan adanya teknologi informasi yang canggih, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengoptimalkan pengumpulan dan analisis data secara efisien, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja. Selain itu, tim yang terlatih dengan baik dalam menerapkan SAKIP juga menjadi kekuatan yang signifikan. Tim yang terampil dan berpengetahuan memungkinkan implementasi SAKIP yang efektif dan tepat waktu.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kelemahan yang perlu ditangani dalam implementasi SAKIP di Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu kelemahan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pemahaman dan keterampilan terkait SAKIP. Dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kepada petugas pajak agar mereka dapat memahami konsep SAKIP dengan baik dan melaksanakannya secara efektif. Selain itu, kurangnya integrasi antara sistem SAKIP dengan sistem lainnya dalam Direktorat Jenderal Pajak juga menjadi hambatan. Integrasi yang lebih baik antara sistem-sistem ini akan memfasilitasi pertukaran data yang lancar dan penggunaan informasi yang lebih holistik dalam penilaian kinerja.

Di sisi peluang, perkembangan teknologi informasi yang terus meningkat menjadi peluang besar dalam meningkatkan implementasi SAKIP. Pemanfaatan teknologi informasi yang lebih canggih dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas SAKIP, termasuk dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data. Selain itu, peluang untuk berkolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga akademik atau ahli terkait, dapat memberikan wawasan baru dan perspektif yang berharga dalam pengembangan SAKIP. Dalam menghadapi ancaman, penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama adalah memperoleh data yang akurat dan terkini. Pajak merupakan bidang yang terus berubah dan kompleks, sehingga penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam SAKIP adalah akurat dan terkini. Peningkatan pengawasan dan kontrol data menjadi langkah kritis untuk mengatasi ancaman ini.

Hasil penelitian analisis SWOT ini memberikan wawasan yang berharga bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan implementasi SAKIP. Upaya perlu dilakukan untuk memperkuat kekuatan yang ada, seperti penggunaan teknologi informasi yang canggih, dan mengatasi kelemahan yang diidentifikasi, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan integrasi sistem. Peluang yang ada, seperti perkembangan teknologi informasi dan kolaborasi dengan pihak eksternal, dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SAKIP. Direktorat Jenderal Pajak perlu fokus pada upaya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait SAKIP. Dalam hal integrasi sistem, langkah-langkah harus diambil untuk memastikan interoperabilitas yang baik antara sistem SAKIP dan sistem lainnya dalam Direktorat Jenderal Pajak, sehingga data dapat diintegrasikan dengan baik dan memberikan informasi yang lebih komprehensif. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi informasi. Investasi dalam teknologi yang lebih canggih dan solusi digital dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data, pengumpulan informasi, dan pelaporan kinerja. Langkah ini akan memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan SAKIP dengan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga akademik atau ahli terkait, juga dapat memberikan manfaat signifikan dalam pengembangan SAKIP. Melibatkan perspektif dan pengetahuan dari luar dapat membantu memperluas pemahaman dan mengidentifikasi praktik terbaik dalam implementasi SAKIP. Direktorat Jenderal Pajak dapat menjalin kemitraan yang erat dengan pihak-pihak ini untuk mendapatkan wawasan dan dukungan yang diperlukan.

Dalam menghadapi ancaman, Direktorat Jenderal Pajak harus mengutamakan pengawasan dan kontrol data. Upaya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam SAKIP adalah akurat, relevan, dan terkini. Peningkatan kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengumpulan dan pengolahan data akan membantu mengatasi ancaman ini. Selain itu, pelibatan audit internal dan eksternal dapat memberikan mekanisme pengawasan tambahan untuk memastikan keandalan data dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip SAKIP.

Secara keseluruhan, analisis SWOT sebagai implementasi SAKIP dalam Direktorat Jenderal Pajak memberikan pemahaman yang mendalam tentang kondisi saat ini dan potensi masa depan. Dengan memanfaatkan kekuatan yang ada, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman, Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan implementasi SAKIP dan mencapai tujuan akuntabilitas kinerja yang lebih baik. Langkah-langkah strategis yang diambil sebagai hasil dari analisis ini akan berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan pajak secara transparan dan akuntabel.

E. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis SWOT yang dilakukan, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan. Salah satu kekuatan utama DJP adalah adanya sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman di bidang perpajakan. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas perpajakan dengan baik. Selain itu, DJP telah mengadopsi dan mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang kuat dan canggih, yang membantu dalam efisiensi operasional dan pengelolaan data yang lebih baik. Hal ini dapat mempercepat proses perpajakan dan meningkatkan keakuratan dalam pelaporan keuangan. Namun, analisis SWOT juga mengungkapkan beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Meskipun demikian, analisis SWOT juga menyoroti adanya peluang yang dapat dimanfaatkan DJP. Namun, implementasi SAKIP dalam DJP juga menghadapi beberapa ancaman. Dalam kesimpulannya, implementasi SAKIP dalam DJP memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang, DJP perlu memperkuat kekuatan-kekuatan yang dimilikinya, seperti sumber daya manusia yang kompeten dan sistem teknologi informasi yang kuat. Selain itu, upaya perbaikan juga perlu dilakukan dalam mengatasi kelemahan yang ada, seperti pengembangan sistem otomatisasi yang lebih komprehensif dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait. Dengan demikian, DJP dapat menghadapi ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas perpajakan.

REFERENSI

- Al Bashir Tamar, Et Al. (2022). Dampak Efektivitas Penerapan Sistem Reward Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Direktorat Jenderal Pajak (Djp). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–11.
- Badruzaman, J., & Chairunnisa, I. (2012). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal Nasional Terakreditasi*, 7(1), 57–70.
- Engkus, Et Al. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 39–46.
<https://doi.org/10.54783/Dialektika.V19i1.62>

- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik Dalam Perspektif Ekologi. *Jispo Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 91-101
- Irda, W. A., Et Al. (2015.). *Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang*.
- Jannah, A., (2017). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Berbasis Swot Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. In *Jurnal Jobs* (Vol. 3). Retrieved From [Https://Jurnal.Polines.Ac.Id/Index.Php/Jobs](https://Jurnal.Polines.Ac.Id/Index.Php/Jobs)
- Khasanah, S. N., & Yushita, A. N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(8).
- Lidya, G. (2021). *Analisis Pengaruh Layanan Pajak Online, Pengaruh Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Cabang Pulogadung)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Monoarfa, Et Al. (2017). Analisis Tata Kelola Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 8(1).
- Murdi, Et Al. (2020.). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kota Payakumbuh. In *Jurnal Ekonomi* (Vol. 23).
- Nggini, Y. H. (2019). Analisis Swot (Strength, Weaknes, Opportunity, Threats) Terhadap Kebijakan Pengembangan Pariwisata Provinsi Bali. In *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* (Vol. 3). Retrieved From <Http://Journal.Undiknas.Ac.Id>
- Suparman, Et Al. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung* (Vol. 5). Jurnal Administrasi Publik.